

**Analisis Yuridis Terhadap Pekerja Alih Daya Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang**

*Juridical Analysis of Outsourced Workers Based on Law Number 6 of 2023 on
Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job
Creation into Law*

TESIS

Oleh:

NDINTA HERRY PRAMANA

2302198019



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

Analisis Yuridis Terhadap Pekerja Alih Daya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Juridical Analysis of Outsourced Workers Based on Law Number 6 of 2023 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

NDINTA HERRY PRAMANA

2302198019



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ndinta Herry Pramana
NIM : 2302198019
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 25 November 2024


METERAI TEMPEL
SDDEBAMX077208064
Ndinta Herry Pramana
NIM: 2302198019



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Oleh:

Nama : Ndinta Herry Pramana
NIM : 2302198019
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 25 November 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Hulman Panjaitan, S. H., M. H.
NIDN: 0020096802

Pembimbing II

Dr. Andrew Bethlen, S. Kom., M. M., S. H., M. H.
NIDN: 0331038704

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Ratri Saragi, S. H., M. H.
NIDN: 0305097105

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Dy Bernadeta Nadeak, M. Pd., PA.
NIDN: 0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Hari Senin tanggal 25 November 2024 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Ndinta Herry Pramana
NIM : 2302198019
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG” oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1.	Dr. Hulman Panjaitan, S. H., M. H.	Sebagai Ketua	
2.	Dr. Andrew Bethlen, S. Kom., M. M., S. H., M. H.	Sebagai Anggota	
3.	Dr. Paltiada Saragi, S. H., M. H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 25 November 2024



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ndinta Herry Pramana
NIM : 2302198019
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pekerja Alih Daya
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 25 November 2024


#DECCAMK077208065
Ndinta Herry Pramana
NIM: 2302198019

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pekerja Alih Daya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang”** tepat pada waktu yang ditentukan. Tujuan dari penulisan Tesis ini yaitu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan para pembimbing, oleh karena itu ucapan terima kasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang terhormat Dr. Hulman Panjaitan, S. H., M. H., selaku Pembimbing 1, dan Dr. Andrew Bethlen, S. Kom., M. M., S. H., M. H., selaku Pembimbing 2 serta Bapak Dr. Paltiada Saragi, S. H., M. H. selaku penguji yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya tesis ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. Edward Sirait, S, E., M. M., Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Prof. Dhaniswara K. Harjono, S. H., M. H., M. B. A., Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI)

3. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA, Direktur Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (UKI)
4. Dr. Paltiada Saragi, Ketua Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI).
5. Dr. Hulman Panjaitan, S. H., M. H. dan Dr. Andrew Bethlen, S. Kom., M. M., S. H., M. H. selaku pembimbing dan penguji pada Ujian tesis yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yang tidak penulis sebutkan satu persatu.
7. Istri saya tercinta dan tersayang, Ira Maria Sembiring beserta anak – anak saya Mario Hugo Ginting dan Marquez Othniel Ginting yang selalu memberikan cinta kasih, dukungan dan doa untuk Penulis menyelesaikan tesis ini.
8. Orang Tua serta adik – adik saya, Andri Maranatha Ginting, Andreas Ginting dan Keluarga, Jhonson Egia Ginting dan Keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan moral dan semangat untuk keberhasilan bagi saya.
9. Keluarga besar SIMGROUP, Bpk. Suhartono S.H., Bpk. Rusdimin, Bpk. I Dewa Putu Prayoga, Bpk. Setia Budi Tarigan, Bpk. Indra Gunawan, Ibu Mira Sonia, Bpk. Cek Fatwa, Bpk. Febrian Pratama, Bpk. Erman Sugiarto, Bpk. Doddi Walyadi, Bpk. Luri Rahman dan Ibu Sarah Achsanti Silalahi,

yang telah memberikan sumbangsih berupa ilmu, waktu dan semangat yang luar biasa kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

10. Rekan – rekan Penulis di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Jakarta Timur, Bpk. Eric Sandy Pahala, Bpk. David Simbolon, Bpk. Zhu Susanto, Bpk. Sutrisno Sianturi dan Ibu Rose Yuniarti yang terus bersemangat untuk mendukung program Kerjasama kelas RPL MH UKI untuk menambah wawasan.

11. Rekan – rekan Penulis di Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah menjadi teman satu perjuangan penulis, serta semua pihak yang telah membantu dan turut serta mendukung penulis saat belajar ilmu hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa disertasi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis mengharapkan kiranya disertasi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis, perkembangan ilmu hukum di Indonesia serta praktisi bidang alih daya.

Jakarta, 25 November 2024

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	viii
.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konsep.....	15
F. Metode Penelitian	17
1. Spesifikasi Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19

5. Teknik Analisis Data	19
6. Lokasi Penelitian.....	19
7. Originalitas Penelitian.....	20
8. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II.....	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum.....	24
1. Sejarah Tenaga Kerja	24
2. Tenaga Kerja.....	27
3. Perjanjian Kerja	32
4. Pekerjaan Alih Daya.....	36
B. Tinjauan Teoritis	39
1. Teori Perlindungan Hukum.....	39
2. Teori Perjanjian Kerja.....	40
BAB III.....	42
PENGATURAN PEKERJA ALIH DAYA SETELAH TERBITNYA UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA TAHUN 2023	42
A. Kontrak Kerja Pekerja Alih Daya Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	42
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang	

Cipta Kerja.....	45
C. Analisa Perlindungan Hukum Pada Pekerja Alih Data Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum.....	54
BAB IV.....	58
PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ALIH DAYA.....	58
A. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya	58
B. Upaya Hukum Perselisihan Pekerja Alih Daya dan Perusahaan	61
C. Pemenuhan Hak Pekerja Alih Daya Dalam Teori Perlindungan Hukum	69
BAB V.....	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti Keterangan
APS	Alternatif Penyelesaian Sengketa
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
ILO	<i>International Labour Organization</i>
JAMSOSTEK	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
JHT	Jaminan Hari Tua
JK	Jaminan Kematian
JKK	Jaminan Kecelakaan Kerja
JKP	Jaminan Kehilangan Pekerjaan
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
JP	Jaminan Pensiun
JPK	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
K3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
PMA	Penanaman Modal Asing
RR	<i>Regerings Reglement</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
THR	Tunjangan Hari Raya
TUPE	<i>Transfer of Undertaking Protection of Employment</i>

UM	Upah Minimum
UMK	Upah Minimum Kabupaten
UMP	Upah Minimum Provinsi
UU PPHI	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri



ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Yuridis Terhadap Pekerja Alih Daya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Kata Kunci : Pekerja, Alih Daya, *Outsourcing*, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Penelitian ini membahas analisis yuridis terkait pekerja alih daya (*outsourcing*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pekerja alih daya setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023 dan apakah peraturan tersebut mampu melindungi dan memenuhi hak pekerja alih daya dari eksploitasi pengusaha yang terus terjadi di Indonesia sekarang ini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku saat ini, dan data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal dan *website*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, beberapa ketentuan telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan tenaga kerja *outsourcing*. Berdasarkan perbandingan yang lama antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, perlu diingat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja juga menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan perlindungan tenaga kerja. Beberapa ketentuan, seperti yang berkaitan dengan jenis pekerjaan, waktu kerja, dan pesangon, dianggap dapat mengurangi perlindungan bagi tenaga kerja yang di *outsourcing*. Selain itu Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 mengatur perlindungan pekerja dari jaminan sosial, hari dan jam kerja, waktu dan hari libur, upah dan tunjangan, dan ketentuan pemutusan hubungan kerja. Namun, jika terjadi ketidaksesuaian yang dialami oleh pekerja alih daya, mereka dapat mengambil tindakan hukum non-litigasi seperti bipartit, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.

Kata Kunci: Pekerja, Alih Daya, *Outsourcing*, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

ABSTRACT

Title of Thesis : *Juridical Analysis of Outsourced Workers Based on Law Number 6 of 2023 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law*
Keywords : *Workers, Outsourcing, Law Number 6 of 2023 on Job Creation.*

This research discusses the juridical analysis of outsourced workers in terms of Law No. 6 of 2023 on Job Creation Stipulating Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law. This study aims to determine the regulation of outsourced workers after the issuance of the Job Creation Law and whether the regulation is able to protect and fulfill the rights of outsourced workers from the exploitation of employers that continues to occur in Indonesia today.

This research uses qualitative research with normative legal research methods. The data sources used are primary data in the form of laws and government regulations of the Republic of Indonesia that are currently in force, and secondary data consisting of books, journals and websites.

The result of this research can be concluded that in Law Number 13 of 2003 on Manpower, several provisions have been amended by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law, including provisions relating to outsourced labor. Based on the old comparison between the Manpower Law and the Job Creation Law, it should be noted that the Job Creation Law has also caused controversy, especially in relation to labor protection. Some provisions, such as those relating to the type of work, working time, and severance pay, are considered to reduce protection for outsourced labor. In addition, the Job Creation Law No. 6 of 2023 regulates the protection of workers from social security, working days and hours, time and holidays, wages and benefits, and provisions for termination of employment. However, in the event of discrepancies experienced by outsourced workers, they can take non-litigation legal action such as bipartite, mediation, conciliation, or arbitration.

Keywords: *Workers, Outsourcing, Law Number 6 of 2023 on Job Creation.*